

**AAK MANGGALA**  
AKADEMI ANALIS KESEHATAN MANGGALA YOGYAKARTA  
AKREDITASI LAM - PT Kes

Kampus 1 : Jl. Bratajaya 25 Sokowetan Banguntapan Bantul Yogyakarta 55198  
Telp. / Fax. 0274 - 543532 - 0812 2766 5919  
Kampus 2 : Jl. Janti No.10 Gedong Kuning (JEC ke Selatan 150m ) Yogyakarta.  
email : aakmanggala@gmail.com | www.aakmanggala.ac.id  
Contact Person : MIKO 081 2276 3159 | Widy 0856 4351 2662

99% Lulusan Terserap di Dunia Kerja Dalam Kurun Waktu Kurang dari 6 bulan

**PENERIMAAN Mahasiswa Baru**  
Program Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis  
Tahun Akademik 2021 / 2022

\* Gunakan Tes Kesehatanmu...  
tdk BUTA WARNA, HbSag negatif  
tidak NARKOBA  
\* Pendaftaran Mulai :  
Januari s/d September 2021

■ Biaya Kuliah Terjangkau

DAFTAR ONLINE 24 DARI RUMAH AJAI JAM  
Pendaftaran Online:  
www.aakmanggala.ac.id | pmb\_aakm  
aakmanggala@gmail.com | 0812 2766 5919  
0274 543532 | aakmanggalayogyakarta

## Karyawan Rubasan Dilatih Memadamkan Kebakaran

BANTUL (KR) - Seluruh pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul, mengikuti pembinaan dasar-dasar penanggulangan bahaya kebakaran di kompleks Rubasan Jalan Srandakan-Bantul Wijirejo Pandak Bantul, Jumat (18/6).

Kepala Rubasan Bantul, Muhammad Syukron Anshori And IP SH, menjelaskan mengingat keamanan dan pengaman dalam upaya penyelamatan gedung Rubasan dengan segala isinya, apabila terjadi bencana kebakaran merupakan tanggungjawab seluruh pegawai Rubasan dan lingkungannya. Maka kemampuan dasar untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan gedung Rubasan dengan segala sarana dan prasarannya, menolong dan mengevakuasi korban sangat diperlukan.



KR-Judiman

**Pelatihan memadamkan api dan penggunaan alat pemadam kebakaran.**

"Karena itu sangat dibutuhkan kemampuan seluruh pegawai untuk memahami dan mengetahui tata cara penanganan barang sitaan. Agar dapat bekerja sesuai standar pengamanan yang mengedepankan kualitas mutu serta profesional," paparnya.

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan sumber daya manu-

sia Rubasan Bantul. Termasuk mengetahui cara penggunaan alat pemadam kebakaran.

Sebagai instruktur dan narasumber dalam pelatihan tersebut adalah petugas Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Bantul. Dalam pelatihan itu, peserta diajarkan cara penggunaan alat pemadam kebakaran, termasuk cara memadamkan api dengan alat seadanya. (Jdm)-f

## KPU Bentuk Kader Pelopor Demokrasi

BANTUL (KR) - Sebagai bagian mempersiapkan Pemilu 2024 mendatang, KPU Bantul menyiapkan Kader Pelopor Demokrasi di 3 (tiga) Kalurahan di Bantul. Kader pelopor yakni Desa Banguntapan di Kapanewon Banguntapan, Desa Bangunharjo Kapanewon Sewon dan Desa Ngestiharjo Kapanewon Kasihan. Ketiga kalurahan yang ditetapkan sebagai Desa Pelopor Demokrasi ini pada pemilihan tahun 2020 yang lalu berada pada angka partisipasi pemilih yang rendah dibandingkan dengan kalurahan yang lain.

Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho SAnt, Minggu (20/6), menuturkan partisipasi pada pemilihan 2020, Kalurahan Banguntapan 64,48 persen, Kalurahan Bangunharjo 76,46 persen dan Kalurahan Ngestiharjo 66,68 persen.

"Angka ini masih di bawah rata-rata partisipasi tingkat Kabupaten Bantul yaitu 80,32 persen. Melalui program desa pelopor demokrasi ini diharapkan pada Pemilu serentak 2024 terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan di ketiga kalurahan tersebut.

Ditegaskan, di masing-masing kalurahan ini akan dibentuk 25 kader pelopor demokrasi. KPU Bantul bekerjasama dengan Pemerintah Kalurahan setempat untuk merekrut calon-calon kader ini.

"Beberapa persyaratan untuk menjadi kader pelopor demokrasi antara lain berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 50 tahun, tidak menjadi anggota partai politik, berdomisili di wilayah kalurahan yang ditetapkan menjadi desa pelopor demokrasi, dapat membaca dan menu-

lis dan peserta diutamakan dari warga yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti karang taruna, PKK, kader kesehatan dan sebagainya," jelasnya.

Peserta kader pelopor demokrasi ini terbuka untuk basis pemilih disabilitas, pemilih pemula, pemilih perempuan maupun pemilih muda. Selanjutnya kader pelopor demokrasi yang dibentuk ini akan mendapatkan pembekalan secara intensif berupa materi-materi tentang nilai-nilai demokrasi serta teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Bantul, Musnif Istiqomah, menambahkan KPU Bantul bekerjasama dengan Pemerintah Kalurahan setempat, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY serta Pemkab Bantul. Adapun keterlibatan instansi terkait untuk menjamin dan memastikan program desa pelopor demokrasi dapat berlangsung berkesinambungan.

"Kader pelopor demokrasi yang telah terbentuk ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk kader turunan berbasis dusun dan Rukun Tetangga (RT) dan instansi berkomitmen memberikan pendampingan desa pelopor demokrasi ini melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik serta kegiatan magang mahasiswa," jelasnya.

Adapun pemerintah kalurahan juga akan memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kader pelopor demokrasi salah satunya dengan memberikan dukungan fasilitasi koordinasi di tingkat kalurahan. (Aje)-f

## SILATURAHMI DAN DIALOG

## Wujudkan Kerukunan Umat Beragama



KR-Judiman

**Pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama.**

BANTUL (KR) - Kantor Kemenag Bantul menggelar 'Knowledge Sharing Aktor-Aktor' kerukunan umat beragama di Gabusan Jalan Yogya-Parangtritis, Kamis (17/6). Kegiatan tersebut sebagai sarana silaturahmi, dialog dan diskusi untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Bantul.

Pranata Humas Kantor Kemenag Bantul, H Ponijo SAg MPdI selaku ketua penyelenggara, melaporkan knowledge sharing tersebut diikuti Forkompim-

kab Kapanewon Jetis, tokoh lintas agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kapanewon Jetis Bantul.

"Kegiatan ini bertujuan sebagai penguatan peran tokoh agama dalam menjaga dan memelihara kerukunan serta sebagai langkah antisipasi terhadap timbulnya konflik antar umat beragama," papar Ponijo.

Sementara Kepala Kemenag Bantul, H Aidi Johansyah, mengemukakan moderasi beragama adalah

tanggungjawab bersama. Tidak mungkin berhasil menciptakan kerukunan hanya dilakukan oleh perorangan atau instansi tertentu saja, seperti Kemenag.

"Kerja sama itu perlu, juga saling bergandengan tangan, mulai dari masyarakat luas, pegiat pendidikan, ormas keagamaan, media, para politisi, dunia birokrasi dan aparat sipil negara," ungkap Aidi.

Kepala Badan Kesbangpol Bantul, Drs Fatoni, menekankan kondisi Bantul tidak dipungkiri dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, masih dijumpai potensi terjadinya konflik antar umat beragama. Untuk itu perlunya deteksi dini.

Sedangkan Dr Iman Muhsin MAg pengurus FKUB Bantul menyampaikan materi penguatan moderasi beragama. "Moderasi beragama harus kita jadikan sarana mewujudkan keamalahatan kehidupan beragama dan bangsa yang rukun," pungkasnya. (Jdm)-f

## OBJEK WISATA DITUTUP

# Pemerintah Mau Bayar Utang Pelaku Usaha?

KRETEK (KR) - Keluarnya Instruksi Bupati No 15/Instr/2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro dibarengi penutupan objek wisata yang dikelola Pemkab Bantul menuai polemik. Sektor wisata yang tengah berjuang bangkit dari keterpurukan selama pandemi kembali terhempas.

Pelaku usaha di sepanjang pantai selatan Bantul kembali tersungkur dengan instruksi bupati tersebut. "Merujuk data Gugus Tugas Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek selama tahun 2020, 2021 di Dusun Mancingan terdapat 39 warga terpapar Covid-19. Mereka warga saya, yang sama sekali tidak ikut terlibat dalam kegiatan wisata pantai," ujar Kepala Dusun Mancingan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek, Handri Sarwoko, Minggu (20/6).

Selama ini warga Kretek punya kesadaran cukup baik dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga Covid-19 bisa dikendalikan meski ada ratusan ribu wisatawan silih berganti masuk Parangtritis.

Sementara pemilik Rumah Makan Seafood Salsabila Pantai Depok Bantul, Dardi Nugroho, mengatakan sepanjang Sabtu-Minggu kemarin, tidak satupun wisatawan mampir ke rumah makannya. "Kebijakan ini sama saja membunuh pelaku usaha di pantai. Kami masyarakat berjuang supaya bisa menyambung hidup, mestinya pemerintah tidak seperti ini caranya," ujarnya.

Momentum akhir pekan jadi tumpuan pelaku usaha pantai mendapatkan rezeki. Hasilnya bisa menopang keluarga dan membayar cicilan di bank. "Cicilan di perbankan tidak mau ditunda dengan alasan apapun. Apalagi dengan dalih wisatawan pantai sepi," ujarnya.

Dengan kebijakan tersebut, Dardi berharap pemerintah mau membayar utang pelaku usaha kuliner seafood di Pantai Depok. Penutupan objek sangat tidak manusiawi,

disaat masyarakat terpukul dilanda pandemi justru pemerintah menutup objek wisata. Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis SE, mengatakan mestinya dalam mengeluarkan kebijakan kaji dengan seksama. Tidak sekadar dari bidang kesehatan, tapi bidang ekonomi juga. Tahun kedua pandemi ini bidang kesehatan dan ekonomi harus seiring. Politisi PAN inipun ragu instruksi bupati ini sudah dikaji mendalam atau belum. "Memang benar gubernur menginstruksikan untuk mengambil langkah strategis dalam mencegah Covid-19, tapi kan tidak serta merta melakukan penutupan objek wisata seperti ini," ujar Wildan.

Terbitnya Instruksi Bupati dadakan dengan menutup objek wisata tentunya membuat semua pihak terkejut. Apalagi, ins-

truksi terkait penutupan tempat wisata yang dikelola pemerintah terkesan tidak adil. Mereka sudah kulakan, tiba-tiba instruksi penutupan. Warga sudah keluar modal banyak itu harus ditanggung sendiri.

"Harusnya dilakukan kajian mendalam. Benar kasus positif Covid-19 naik, harusnya ketua gugus bidang ekonomi dilibatkan dalam menyusun sebuah instruksi. Jangan hanya dilihat dari bidang kesehatan saja, tapi bidang-bidang pemulihan ekonomi juga harus diperhatikan. Kapan kita mau bangkit ekonominya kalau seperti ini," keluhannya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Kwintarto Heru Prabowo, mengatakan jika instruksi bupati sudah disahkan. Dirinya sebagai kepala Organisasi Peringkat Daerah (OPD) hanya melaksanakan dari keputusan tersebut. "Kalau ditanya terkait penutupan tersebut tentu sangat prihatin, tapi kan harus dilaksanakan," ujar Kwintarto. (Roy)-f

## SOSIALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

# DP3AP2 DIY Siapkan Pendampingan



KR-Juvinarto

Lurah Argorejo Ngadimin SH, Anggota DPRD DIY Komisi D Umaruddin Masdar SAg dan Kepala Seksi Data Informasi Gender dan Kerjasama DP3AP2 DIY Arif Nasiruddin SPsi MA.

BANTUL (KR) -- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY siap menerima laporan dan memberikan pendampingan perempuan dan anak yang menjadi korban. Kekerasan pada perempuan dan anak menjadi salah satu isu/permasalahan dalam pemberdayaan/perindungan perempuan dan anak yang ditangani DP3AP2 DIY.

"Sosialisasi DP3AP2 DIY sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana terus kita lakukan bersinergi dengan masyarakat," tutur Kepala Seksi Data Informasi Gender dan Kerjasama DP3AP2 DIY Arif Nasiruddin SPsi MA, dalam sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Balai Desa Argorejo, Sedayu, Bantul, Sabtu (19/6) pagi.

Sosialisasi yang diselenggarakan DP3AP2 DIY ini dibuka resmi oleh Lurah Argorejo Ngadimin SH dengan narasumber

lainnya Anggota DPRD DIY Komisi D Umaruddin Masdar SAg, dan aktivis perempuan Amin Nur Rohmah dari Perkumpulan Aksara. Dilaksanakan dengan disiplin prokes, acara dihadiri ibu-ibu, kader PKK.

"Program kegiatan DP3AP2 DIY yaitu mendorong implementasi pengarusutamaan gender (PUG), mendorong perempuan dalam pembangunan, upaya pendewasaan usia perkawinan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta ketahanan keluarga. Tersedia Layanan TeSaGa telepon sahabat dan keluarga, untuk telekonsuling di 0274-565003 dan di medsos, juga pendampingan P2TPA KK Reko Dyah Utami di Jalan Balirejo 29 UH Yogya," ujar Arif Nasiruddin.

Disebutkan isu/permasalahan lain seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, perkawinan anak, partisipasi perempuan dalam politik yang masih rendah, kematian ibu dan bayi, tingginya stunting, meningkatnya HIV/Aids dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi perhatian DP3AP2 DIY.

Sebelumnya Umaruddin Masdar SAg menyebutkan tingkat kekerasan pada anak dan

perempuan masih tinggi. "Sehingga perlu edukasi seperti dilakukan dengan sosialisasi oleh DP3AP2 DIY dengan membangun relasi pada masyarakat," ujarnya.

Kebijakan dalam pemberdayaan perempuan dan anak di DIY, lanjut Umaruddin, diantaranya diatur dalam Perda Nomor 2/2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perda Nomor 7/2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Perda Nomor 3/2012 tentang Perindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. "Perempuan dan anak yang menjadi korban harus ditangani baik dengan ketersediaan shelter di 5 kabupaten/kota wilayah DIY," tegasnya.

Sedang Amin Nur Rohmah menjelaskan pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. "Selama ini pelaku kekerasan pada ibu (perempuan) dan anak justru dari laki-laki, orang dekat atau keluarga sendiri. Dengan kesetaraan gender kekerasan pada perempuan bisa ditekan," ujarnya. (Vin)-f